

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM TATA KELOLA SAMPAH
BERKELANJUTAN DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

ALIFTA SAVANAMIROH MASSI

Nomor Induk Mahasiswa: 105641100620

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA SAMPAH
BERKELANJUTAN DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

ALIFTA SAVANAMIROH MASSI



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Collaborative Governance* Dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan Di Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Alifta Savanamiroh Massi
Nomor Induk Mahasiswa : 105641100620
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si



Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui:

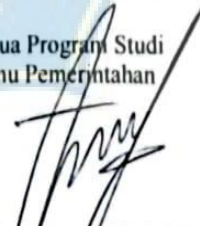
Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727



Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

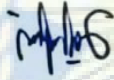
NBM: 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0244/FSP/A.4-II/II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari selasa, tanggal 28 februari 2024.

TIM PENILAI

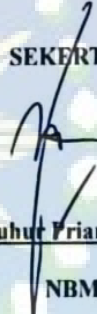
KETUA



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727

SEKERTARIS



Andi Luhut Prianto, S.IP., M.Si

NBM. 992797

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Nur Khaerah, S.IP.,M.IP
3. Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alifta Savanamiroh Massi

Nomor Induk Mahasiswa : 105641100620

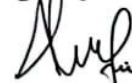
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan di Kota Makassar" ini adalah karya saya sendiri bukan hasil plagiat dari sumber lain. Saya menegaskan bahwa karya ini adalah hasil karya orisinal saya dan tidak merupakan plagiat dari sumber lain.

Saya telah mengutip dengan benar sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam komunitas akademik. Jika terjadi pelanggaran terhadap karya ini di masa depan, saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Februari 2023

Yang menyatakan,



Alifta Savanamiroh Massi

ABSTRAK

Alifia Savanamiroh Massi 2024, *Collaborative Governance* Dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan di Kota Makassar (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Ahmad Taufik)

Penelitian ini fokus dalam mengkaji *Collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar yang memunculkan soal persoalan permasalahan sampah di Kota Makassar adanya pengelolaan sampah yang belum optimal oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Tulisan ini akan mengkaji terkait *collaborative governance* yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk melihat *collaborative governance* dalam konteks tata kelola sampah berkelanjutan. Sementara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, yaitu telah dilakukan pertemuan dialog tatap muka antara dinas lingkungan hidup Kota Makassar, yayasan peduli negeri dan masyarakat. Kedua, keberhasilan kolaborasi antara dinas lingkungan hidup, yayasan peduli negeri bergantung pada kepercayaan didasarkan pada kepercayaan dalam pelaporan dan evaluasi oleh pihak dinas lingkungan hidup Kota Makassar serta partisipasi masyarakat dalam program pelatihan manajemen sampah. Ketiga, keberhasilan kolaborasi dilihat dari komitmen terhadap proses yang berhasil antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Yayasan Peduli Negeri tercermin dari keberhasilan dalam program pengelolaan sampah. Keempat, penguatan pemahaman bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Yayasan Peduli Negeri dilakukan melalui rekrutmen motivator pengelola bank sampah di setiap kecamatan. Kelima, hasil sementara dari *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar telah menghasilkan pencapaian sebesar 100%, termasuk melalui kegiatan budidaya maggot di Paccerakkang yang melibatkan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan TP3R dan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2023.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, tata kelola sampah berkelanjutan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Skripsi yang berjudul **“Collaborative Governance dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan Di Kota Makassar”** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan Skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penulisan skripsi ini, tidak boleh dilupakan bahwa segala kemampuan dan kelancaran yang penulis miliki merupakan karunia dari Allah SWT, Sang Pencipta. Dia-lah yang memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini merupakan tantangan yang tidak mudah, namun penulis juga menyadari bahwa ada banyak pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan segala usaha, tenaga, pikiran, bimbingan dan dukungan kepada penulis.

1. Teristimewa kepada cinta pertama saya Alm. Hardi Wijaya Massi, Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Banyak hal yang menyakitkan yang penulis lalui tanpa kehadiran sosok beliau, rasa iri dan rindu yang sering kali dirasakan oleh penulis membuat penulis terjatuh tertampar realita, tapi rasa itu tidak mengurangi rasa bangga. Terima kasih atas kehidupan yang beliau berikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada malaikat pelindung yang ada di surga.
2. Kepada pintu surgaku, mama tercinta Mulyanti Mamonto yang selalu memberikan dukungan, tenanga, dan perhatiannya. Mama yang hebat untuk kedua anaknya yang terus berusaha bertahan demi membahagiakan anak-anaknya. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang mama berikan hingga penulis bisa berada di titik ini.
3. Kepada yang terkasih, Umi dan Papa, (Widiawati & Samsudin) yang selalu menjadi penyemangat terbaik penulis yang memberikan seluruh tenaga dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa mencapai gelar sarjana. Kepad adik-adik saya Fahdalis Massi, Wafi lante, Kayyisa lante, Kanisa Lante, dan kakek saya saya selalu menjadi penyemangat kepada penulis untuk menyerlaskan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Muhlis Madani sebagai dosen pembimbing pertama dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP sebagai dosen pembimbing kedua, yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan,

masuk dan mendampingi penulis dalam melakukan penyempurnaan skripsi.

5. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Bapak Ahmad Harakan S.IP.,M.H.I selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Nur Khaerah S.IP., M. IP selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial yang selalu mengawal proses akademik penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang membagikan ilmunya selama proses perkuliahan.
8. Kepada LUNATIK, Isnay, Fika, Zahra, Lulu dan Fitri yang selalu memberikan dukungan, menemani, dan menghibur penulis, serta tempat untuk berbagi keluh kesah. Terima kasih karena sudah menemani penulis selama hampir 4 tahun di perkuliahan.
9. Kepada Nurul Annisa Anastasya saudaraku yang selalu menjadi tempat berbagi keluh kesah, terima kasih karena selalu meluangkan waktu, setia menemani penulis selama penelitian dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga penulis bisa berada di titik ini.
10. Kepada Triana, Uci, Tirta dan Tira dan Aprilia yang selalu menjadi penyemangat serta tempat berbagi keluh kesah selama 14 tahun.
11. Kepada saudara-saudaraku Wiradita Gumalangit dan Hayan Massi yang selalu menghibur penulis dan memberikan motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu

12. Keluarga besar Ilmu Pemerintahan kelas A angkatan 2020, penulis mengucapkan terimakasih banyak selama hampir empat (4) tahun berjuang sama-sama dikelas.

13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dengan berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan dengan sebaik dan semaksimal mungkin untuk berada di titik ini.

Dalam kesadaran akan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat bagi semua yang memerlukannya.

Makassar, 23 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	15
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Fokus Penelitian	32
E. Deskripsi Fokus Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Tipe dan Jenis Penelitian	35
C. Informan	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Pengabsahan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Objek Penelitian	32

B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan Penelitian	63
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	28
Tabel 4.1 Unsur Kolaborasi.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik.....	6
Gambar 1.2 Diagram	7
Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Teori	23
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Makassar	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	40
Gambar 4.3 Pelatihan Khusus Kepada Masyarakat.....	50
Gambar 4.4 Sampah Tertangani Tahun 2021 &2022.....	68
Gambar 4.5 Sampah Tertangani Tahun 2023.	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kolaborasi telah menjadi sebuah paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini selalu melibatkan pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya bersama menyelesaikan berbagai masalah publik (Peranginangin, 2014). Kolaborasi atau kerja sama adalah pemahaman tentang bagaimana tata kelola berjalan melalui lensa jaringan sosial, di mana semua pihak yang memiliki kepentingan terlibat dalam dialog dan pengambilan keputusan, serta dapat mengartikulasikan tujuan mereka secara terbuka. (Habibah et al., 2020)

Collaborative Governance adalah konsep tata kelola pemerintahan dimana pemerintah dan organisasi non-pemerintah berkolaborasi dalam proses pengambilan keputusan resmi. Pendekatannya menitikberatkan pada diskusi dan pencapaian kesepakatan bersama, serta pembagian tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, mengelola program-program yang telah dirancang oleh pemerintah, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah (Irawan, 2017). *Collaborative Governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepakatan yang sama terhadap suatu masalah.

Dalam perkembangan *collaborative governance* atau tata kelola pemerintahan kolaboratif telah menjadi fenomena yang menarik dan tren baru yang patut untuk diteliti yaitu dengan menggunakan model kolaborasi oleh Ansel and Gash (Afrisal 2022). Kolaborasi pemerintah adalah sebuah bentuk pengelolaan tata kelola yang melibatkan entitas, baik yang bersifat publik maupun non-publik, termasuk individu dan kelompok, dalam proses resmi pembentukan kebijakan. Pendekatan ini ditekankan pada semangat kesepakatan bersama dan partisipasi, dengan tujuan utama mengembangkan serta menjalankan kebijakan publik, serta mengelola program atau sumber daya publik. (Ansell & Gash, 2008).

Collaborative governance dijelaskan sebagai komponen dari konsep tata kelola yang lebih luas. Ini ditandai oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dengan tingkat kesetaraan, partisipatif, serta upaya untuk menghindari tekanan politis dan administratif (Mukti & Efendi, 2020). Meskipun memiliki struktur formal, pendekatan ini tetap sederhana dan difokuskan pada pencapaian solusi dan program yang efektif. Pendekatan kolaboratif ini menjadi landasan bagi pemerintahan lokal untuk mengadopsi konsep tata kelola yang melibatkan kerjasama dengan berbagai entitas. Pemerintahan tingkat lokal memanfaatkan pendekatan ini untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Salah satu contohnya adalah permasalahan tata kelola sampah berkelanjutan, yang masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan (Andhika, 2017).

Tata kelola sampah telah menjadi isu kritis yang dihadapi oleh banyak kota. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, jumlah penduduk yang bertambah juga memberikan kontribusi terhadap timbulnya masalah lingkungan (Ulum & Ngindana, 2017). Tata kelola sampah berkelanjutan melibatkan lebih dari sekadar aspek teknis pengelolaan sampah. Sampah berkelanjutan merujuk pada strategi atau metode pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat (Mahyudin, 2017). Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkenalkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kerangka kerja global untuk pembangunan dari tahun 2015 hingga 2030. SDGs bertujuan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di seluruh dunia, termasuk institusi pemerintah, sektor swasta, industri, dan organisasi regional dan internasional, untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut (Ranawijaya & UNUD, 2018).

Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 merupakan upaya dan rencana yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan dan keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas lingkungan kehidupan generasi sekarang dan mendatang (Rosana, 2018). Dari 17 tujuan SDGs tata kelola berkelanjutan masuk pada tujuan ke 11 dan 12 khususnya pada pilar lingkungan tujuan ke 11 kota dan permukiman berkelanjutan, sedangkan untuk tujuan ke 12 yaitu

menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Pengelolaan Sampah Kota dari perspektif pemenuhan pembangunan berkelanjutan secara global atau SDGs, diperlukan analisis terhadap pencapaian aspek-aspek berkelanjutan dalam pengelolaan sampah kota. Ini termasuk aspek lingkungan, di mana konsep berkelanjutan dalam sistem pengelolaan sampah kota yang diterapkan selama ini menunjukkan peningkatan namun masih belum mencapai tingkat optimal.

Mengelola sampah dengan efisiensi, memperhatikan aspek ramah lingkungan, serta berfokus pada keberlanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Juga mencakup elemen-elemen penting seperti regulasi dan kebijakan, keterlibatan masyarakat, edukasi, dan kesadaran lingkungan. Sampah berkelanjutan juga sebagai sampah yang dikelola atau diatasi dengan cara yang memperhatikan keberlanjutan, dengan mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif yang dapat diambil dari sampah tersebut. Dengan menggunakan praktik-praktik berkelanjutan, tujuannya adalah meminimalkan dampak lingkungan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Peran yang sangat penting dalam hal ini adalah peran pemerintah dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung prinsip tata kelola sampah yang berkelanjutan. Beberapa penelitian yang sedang berkembang berusaha untuk menginvestigasi tantangan dan solusi terkait dengan tata kelola sampah berkelanjutan, termasuk yang terfokus pada permasalahan

yang masih belum terselesaikan oleh pemangku kepentingan di Kota Makassar.

Permasalahan sampah di Kota Makassar menjadi perhatian oleh berbagai kalangan karena Kota Makassar tidak berhasil meraih penghargaan Adipura untuk tahun 2023. Jumlah dan tingkat pertumbuhan di Makassar semakin meningkat pada tahun 2023. Karena itu, kenaikan volume sampah setiap tahunnya terus meningkat hingga mencapai 11,53 persen (Kurniawan n.d.). Kondisi ini dapat didasari oleh dua faktor utama, yang pertama adalah peningkatan produksi sampah di masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan yang kedua adalah kurangnya efisiensi dalam pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang semakin mengalami kelebihan kapasitas (Legi 2022).

Berdasarkan data Lingkungan Hidup kota Makassar volume sampah pada tahun 2022 mencapai 7.374,5 ton per bulan dan 245,8 ton per hari. Potensi sampah Kota Makassar pada tahun 2021 adalah 410.291 ton atau dalam satu bulan mencapai 34.190 ton dan dalam satu hari mencapai 1.139 ton (Humaerah 2022). Tumpukan sampah yang terus bertambah dan tidak terkendali, serta perkembangan lingkungan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) saat ini, mencakup banyak perumahan baru yang mengalami pencemaran udara akibat emisi gas-gas yang dihasilkan dari sampah tersebut membusuk (Sembel, 2015). Sesuai dengan kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Ikram, 2020). Pemerintah Kota

Makassar dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah, atau bekerja sama dengan pihak swasta seperti, di membentuk lembaga perumahan di Kota Makassar yang memiliki manajemen pengelolaan sampahnya sendiri. Pemerintah Kota juga ingin meningkatkan bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, yang dilakukan dengan cara, mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan.(Huduri, 2018).

Kota Makassar telah mengalami peningkatan yang cukup besar dalam produksi sampah, yang telah berdampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan penduduk. Permasalahan sampah di Kota Makassar adanya pengelolaan sampah yang belum optimal oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Makassar pada TPA Tamangapa tahun 2023 pada bulan Mei-November mencapai cukup meningkat.

Gambar 1.1

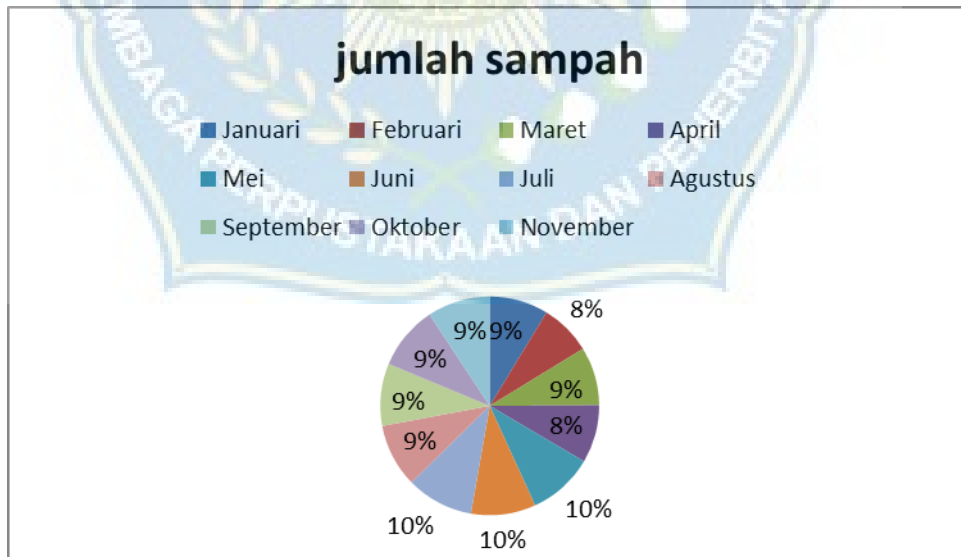
Jumlah Timbunan Sampah Tahun 2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 2024

Gambar 1.2

Jumlah Sampah Tahun 2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 2024

Dari gambar diatas bisa dilihat jumlah timbunan sampah pada bulan Januari-November pada tahun 2023. Jumlah timbunan sampah pada bulan

Januari sebanyak 24.971.300 atau sebesar 9%. Pada bulan Februari jumlah timbunan sampah sebanyak 21.582.800 atau sebesar 8%. Pada bulan Maret jumlah timbunan sebanyak 24.753.400 atau sebesar 9%. Pada bulan April jumlah timbunan sampah sebanyak 24.412.700 atau sebesar 8%. Pada bulan Mei Jumlah timbunan sampah sebanyak 27.807.600 atau sebesar 10%. Pada bulan Juni jumlah timbunan sampah sebanyak 27.364.800 atau sebesar 10%. Pada bulan Juli jumlah timbunan sampah sebanyak 28.342.500 atau sebesar 10%. Pada bulan Agustus jumlah timbunan sampah 26.825.000 sebesar 9%. Pada bulan September jumlah timbunan sampah sebanyak 26.322.200 atau sebesar 9%. Adapun pada bulan Oktober jumlah timbunan sampah sebanyak 27.036.500 atau sebesar 9%. Terakhir yaitu pada bulan November jumlah timbunan sampah sebanyak 26.511.200 atau sebesar 9%. Dari penjelasan diatas bahwa jumlah timbunan sampah di Kota Makassar pada tahun 2023 meningkat.

Jumlah sampah di TPA Tamangapa menjadi salah satu permasalahan yang masih belum biasa diatasi dengan baik oleh pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. Namun, perhatian utama saat ini tertuju pada isu sampah berkelanjutan dan kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat, terlibat dalam pengelolaan sampah. Namun, kurangnya kerja sama dan kolaborasi di antara entitas ini telah menghambat upaya bersama untuk mengatasi permasalahan sampah. Dalam situasi ini, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana kelemahan dalam tata kelola dan kolaborasi

pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi akar permasalahan utama yang harus diatasi di Kota Makassar (Rahim, 2022).

Meskipun demikian, hingga saat ini, pelibatan dan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. *Collaborative Governance* tidak akan berjalan dengan baik oleh karena itu tindakan pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah sampah masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih positif dan signifikan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar (Sulaiman, 2021). Kebaharuan dari penelitian ini adalah melihat kerja sama dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat pada sampah berkelanjutan dengan memanfaatkan bank sampah dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Sehingga penelitian ini penting untuk melihat kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat terkait berhasil atau bahkan mengalami kendala terkait *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar, dimana dengan melihat berbagai strategi yang digunakan dalam mengatasi masalah sampah berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan Di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di bagun oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai peneliti atas jawaban dari rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman, karena hasil penelitian ini akan memperluas wawasan. Adapun penelitian ini juga dapat memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat diterapkan secara efektif dalam tata kelola sampah berkelanjutan . Penelitian ini menjadi panduan berharga bagi pihak berwenang setempat dalam merancang kebijakan yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah sampah di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam kolaborasi antar berbagai sektor dalam konteks tata kelola sampah berkelanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan secara positif bagi pihak terkait yang terlibat dalam tata kelola sampah berkelanjutan terkait kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penelitian ini juga berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari tentang *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.



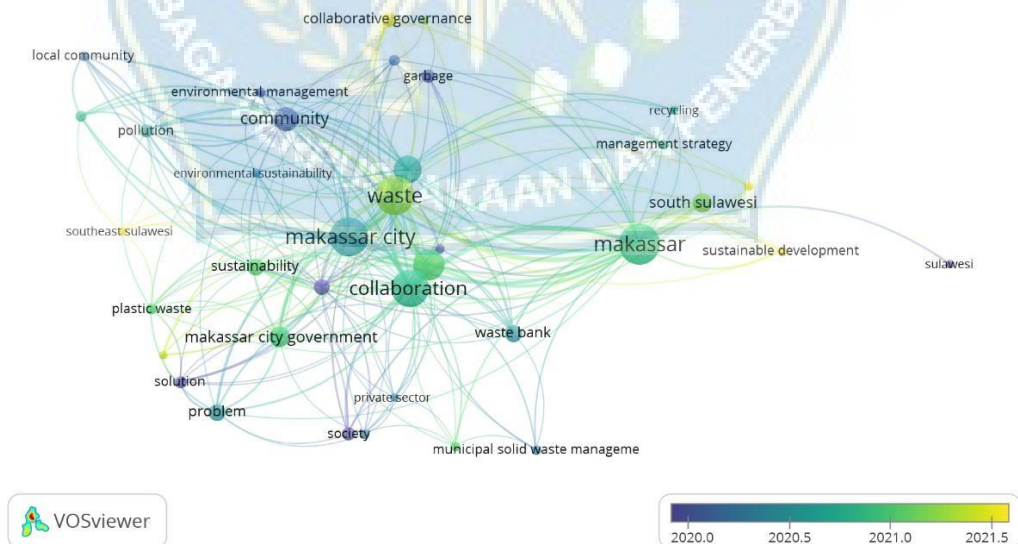
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu sangat penting bagi penulis untuk menjadi landasan perbandingan dan sebagai referensi untuk memperkaya teori yang akan digunakan dalam menyajikan kontribusi penyempurnaan dari penelitian terdahulu dengan konsep yang berbeda dalam sebuah penelitian baru. Adapun beberapa kajian terdahulu yang masih relevan dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan Di Kota Makassar” dengan penelitian terdahulu yang di kelola menggunakan vosviewer.

Gambar 2.1.
Penelitian Terdahulu



Sumber: Aplikasi Vosviewers

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan *publish or perish* ditemukan 108 artikel jurnal dengan pada rentan waktu 2013-2023 yang berkaitan erat dengan kata kunci *collaborative governance; governance; sustainable waste; city Makassar*.

Artikel-artikel tersebut menjadi landasan utama dalam menggali wawasan serta kerangka konseptual yang mendalam mengenai topik tersebut melalui penggunaan aplikasi *vosviewer*. Hasil dari visualisasi *vosviewer* mengelompokan 4 klaster. Klaster 1 warna kuning mencakup 3 item yakni *sustainable development, collaborative governance, dan South east Sulawesi*. Klaster 2 warna hijau terdapat 8 item yakni Makassar, *south Sulawesi, waste, collaboration, Makassar city government, sustainability, plastic waste dan municipal solid waste management*. Klaster 3 warna biru terbagi menjadi 8 item yaitu *recycling, local community, management strategy, waste bank, private sector, problem, pollution dan environmental sustainability*. Yang terakhir klaster 4 warna ungu mencakup 6 item yaitu Sulawesi, *society, solution, environmental management, community dan garbage*.

Dalam penelitian sebelumnya terdapat perbedaan maupun persamaan yang menonjol antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang mengenai *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang terletak pada *collaborative governance*, yaitu kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Sebagaimana yang ada pada penelitian terdahulu yaitu “Tata kelola kolaboratif

pada pengembangan daerah berbasis *smart city* Balikpapan” (Noor, 2022) dan penelitian “Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Rangka Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik di TPA Jatibarang, SemarangKota” (Pradana et al., 2020).

Namun, di sisi lain, penelitian yang difokuskan pada penelitian peneliti adalah *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar memiliki pembeda yang signifikan. Salah satu pembeda utama yaitu pada penelitian terdahulu lebih fokus dalam melihat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang memberikan dinamika unik dalam kerjasama antar-pemangku kepentingan. Sedangkan, penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu fokus dalam melihat kerjasama yang telah berhasil atau mengalami kendala di Kota Makassar, dengan melihat berbagai strategi yang digunakan dalam mengatasi masalah sampah berkelanjutan. Sehingga penelitian ini berupaya mengambil pelajaran berharga yang dapat diadaptasi untuk pengembangan tata kelola yang lebih baik di wilayah lain atau bahkan skala yang lebih luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini membawa dimensi baru dalam pengembangan pengetahuan mengenai *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan, dengan fokus khusus pada wilayah Kota Makassar.

B. Kajian Teori

1. *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengelola badan-badan publik, dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) di luar lingkup pejabat pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mencapai keputusan bersama yang resmi, berdasarkan kesepakatan, melalui proses diskusi yang mendalam, serta memiliki fokus pada kebijakan publik, pelaksanaan program, atau pengelolaan sumber daya public (Habibah et al 2020).

Menurut Ansell dan Gash kolaboratif pemerintahan adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik melibatkan pihak-pihak non-negara secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk menetapkan atau menerapkan kebijakan publik atau mengatur program atau aset publik (Hardi, 2020).

Collaborative governance juga dapat diartikan sebagai suatu proses bersama yang demokratis, dimana setiap peserta memiliki kekuasaan substansial dalam pengambilan keputusan, dan setiap pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang setara untuk mengekspresikan aspirasinya dalam proses tersebut (Kumorotomo, 2013).

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, terjadi kerjasama antar pihak dalam menyampaikan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas.

Meskipun setiap pihak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya, mereka tetap harus patuh pada kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011).

Menurut model pemerintahan kolaboratif Ansell dan Gash, kondisi awal suatu kolaborasi dipengaruhi oleh banyak hal, seperti sejarah kerjasama sebelumnya, kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang berpartisipasi, dan interaksi satu sama lain (Septiani, 2022). Menghormati kerja sama yang dibangun, kepercayaan masing-masing pihak yang berkepentingan, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan. Musyawarah stakeholder, penetapan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi diskusi antar *stakeholder*, dan pembagian keuntungan bersama adalah semua contoh kepemimpinan fasilitatif. Desain institusional berkaitan dengan peraturan dan prosedur dasar kolaborasi, seperti legalitas proses kolaborasi, transparansi proses, partisipasi partisipan, dan eksklusivitas forum (Cahya, 2020).

Mengorganisasikan potensi dari luar menjadi mekanisme kerja yang efektif adalah tantangan terbesar dalam tata kelola kolaboratif. Konsep kolaborasi yang didasarkan pada partisipasi publik sangat rentan bagi birokrasi pemerintahan. Proses terbuka dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik dan memberi masyarakat kesempatan untuk menggunakan anggaran dan membuat keputusan (Lathrop & Ruma, 2010).

Tujuan pembuatan kebijakan dalam pemerintahan kolaboratif adalah untuk "memberdayakan, mencerahkan, dan melibatkan warga negara dalam proses pemerintahan sendiri." Prinsip pertama mengatakan bahwa kebijakan harus mengakui dan mendorong peran yang kuat bagi warga negara biasa dalam memproduksi barang publik bersama. Prinsip kedua mengatakan bahwa kebijakan harus mendorong masyarakat untuk memobilisasi aset mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah.

Prinsip ketiga mengatakan bahwa kebijakan harus mendorong partisipasi publik dengan memberdayakan masyarakat, atau masyarakat, untuk mengusulkan kebijakan publik. Prinsip keempat menyatakan bahwa kebijakan harus mendorong musyawarah publik yang kuat yang berasal dari warga. Prinsip kelima desain dan tata kelola kolaboratif mengatakan bahwa kebijakan harus mendorong kerja sama antara penduduk dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk mereka yang telah mengalami konflik, sehingga infrastruktur sipil menjadi lebih baik dan hasil kebijakan lebih baik. Prinsip keenam desain dan tata kelola kolaboratif mengatakan bahwa pemerintah harus membantu dalam pembuatan ide strategis untuk memastikan bahwa beberapa bagian kewarganegaraan akan menerimanya. Prinsip ketujuh adalah mengubah kultur lembaga, organisasi nirlaba dan pemerintah untuk mendukung produksi nasional dengan berkolaborasi dengan kelompok lain dan melakukan lebih banyak kolaborasi.

Tata kelola kolaboratif dan desain kebijakan berdasarkan prinsip kedelapan memungkinkan untuk menciptakan akuntabilitas yang timbal balik

antara aktor demokrasi warga negara biasa, pemangku kepentingan, dan administrator public (Kariem & Afrijal, 2021).

Model *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (Napo 2023).

Yaitu digambarkan dalam 4 variabel yaitu;

- a. Kondisi awal,
- b. Desain kelembagaan,
- c. Fasilitas kepemimpinan
- d. Proses kolaborasi yang terdiri dari;
 - 1) dialog tatap muka
 - 2) membangun kepercayaan
 - 3) komitmen dalam proses kolaborasi dan;
 - 4) pemahaman bersama

Selanjutnya menurut Ansell and Gash menjelaskan terdapat 5 (lima) indikator dari proses terbentuknya *collaborative governance* yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat (Gunawan and Maruf 2020) antara lain:

- a) *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Pada tahap dialog tatap muka para *stakeholders* yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses dari sebuah kolaborasi akan yang direncanakan dan dilaksanakan (Ansell and Gash, 2007:558). Adanya dialog tatap

muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi tanpa adanya dialog tatap muka pada awal proses kolaborasi ditakutkan akan dapat memunculkan sebuah gejolak dalam proses berjalannya suatu kolaborasi.

b) *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena dalam sebuah kolaborasi bukan hanya terkait tawar-menawar, namun juga menyangkut tentang pembangunan sebuah kepercayaan pada masing-masing stakeholders yang terlibat. Kepercayaan tidak akan langsung hadir begitu saja, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kepercayaan akan sangat berguna dalam jangka panjang pada proses kolaborasi.

c) *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses)

Tahapan terhadap proses mengembangkan sebuah keyakinan bahwa perundingan adalah sebuah cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kebijakan yang diinginkan dalam pemecahan suatu persoalan yang dihadapi. Komitmen dalam prakteknya membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.

d) *Shared Understanding* (pemahaman bersama)

Stakeholders dalam sebuah proses kolaboratif pada suatu titik tertentu membutuhkan pengembangan terhadap suatu proses

pada pemahaman bersama dari apa yang dicapai secara kolektif. Pemahaman bersama juga didefinisikan sebagai proses penyamaan pemahaman terkait suatu pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi suatu persoalan yang dihadapi.

e) *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai)

Pada tahap ini diharapkan dapat muncul sebuah kesepakatan terhadap hasil yang ingin dicapai dalam satu kolaborasi, perancangan dan penyetusan sebuah hasil yang ingin dicapai diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan serta komitmen untuk dapat menjalankan tupoksi pada masing-masing stakeholders guna menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

2. Tata Kelola Sampah Berkelanjutan

a. Pengertian Sampah

Jika berbicara tentang sampah, memang tidak ada habisnya. Sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak kota di dunia. Semakin besar jumlah penduduk dan aktivitasnya maka semakin besar pula jumlah sampah yang dihasilkan. Akibatnya, pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang besar dan lahan yang terus bertambah. Lebih jauh lagi, sampah tentu saja berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dibuang dengan benar Silalahi, (Silalahi et al., 2021). Permasalahan sampah ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap

lingkungan, seperti wabah penyakit, banjir dan rendahnya nilai estetika lingkungan.

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dalam suatu proses produksi baik di industri maupun didalam rumah tangga (Domestik). Sementara itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau setengah padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat *boidegradable* atau *non-biodegradable* yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan berakhir di lingkungan (Ismail, n.d.). Menurut pasal 1 butir 8 Perda Magelang No 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa-sisa kegiatan manusia sehari-hari dan proses alam dalam bentuk padat. Hal yang sama di dalam KBBI (2017), Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat timbul dari kegiatan manusia, hewan dan alam (Sampah, 2021)

b. Pengelolaan Sampah

Permasalahan tentang sampah yang hingga kini belum ditemukan solusinya secara global. Pengelolaan sampah bertujuan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi manusia (Purnomo, 2021). Untuk menghindari dampak yang mungkin terjadi akibat menumpuknya sampah di lingkungan diperlukan upaya pengelolaan sampah.

Mekanisme pengelolaan sampah terdapat dua komponen penting yakni pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Addahlawi et al., 2019).

- 1) Pengurangan sampah merupakan kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang ataupun mendaur ulang sampah di sumbernya maupun di tempat pengolahan sampah.
- 2) Rangkaian kegiatan penanganan sampah mencakup pemilahan (pengelompokkan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu), pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik, dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam dan pemrosesan aktif sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2017, Prinsip pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan metode 3R (Nopiana, 2019) Yakni :

a) *Reduce* (Mengurangi)

Mengurangi barang yang kita gunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Contoh: ganti pemakaian

kantong plastik saat belanja dengan kantong ramah lingkungan seperti tas anyaman pandan/enceng gondok.

b) *Reuse* (Memakai Kembali)

Menggunakan kembali barang-barang yang bisa digunakan, hindari pemakaian barang-barang disposable (sekali pakai), misalnya menggunakan botol plastik yang bisa diisi ulang.

c) *Recycle* (Mendaur Ulang)

Mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, misalnya kemasan bungkus kopi diubah menjadi tas, karpet, dompet, dan lain-lain.

c. Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Pemerintah mendukung inisiatif agar produk tidak menghasilkan sampah dengan mendorong pengelolaan sampah yang bersifat restoratif dan regeneratif sejak tahap perancangan awal produk. Pendekatan ini bertujuan untuk mendefinisikan kembali produk dan layanan, sehingga limbah dari produk dapat diatasi, serta untuk mengurangi dampak negatif dari proses produksi dengan beralih ke sumber energi terbarukan (Zaenafi Ariani et al., 2022). Model pengelolaan sampah semacam ini memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pelaku industri memiliki peran kunci dalam permasalahan sampah plastik yang ada. Mereka telah menciptakan gaya hidup konsumtif

melalui produk-produk yang dikemas dengan praktis menggunakan plastik sekali pakai. Sampah plastik dari kemasan ini menjadi salah satu pencemar di lingkungan kita. Mayoritas sampah plastik diproduksi oleh produsen barang kebutuhan sehari-hari (Fast Moving Consumer Goods atau FMCG) (Hayu Susilo Prabowo, n.d.).

Penggunaan plastik sebagai bahan kemasan dipilih karena dianggap murah dan praktis. Meskipun masalah dampak lingkungan akibat sampah plastik sering muncul, produsen tetap mempertahankan penggunaan plastik sekali pakai dalam produk mereka. Beberapa perusahaan telah mengambil langkah menggantikan plastik dengan kertas dalam kemasan mereka untuk mengurangi dampak lingkungan (Meirsaguna 2016). Namun, penggunaan kertas ini sebenarnya juga memiliki tantangan tersendiri. Proses produksi kertas membutuhkan lebih banyak energi, dan ketergantungan pada kertas dapat mendorong deforestasi yang luas untuk memenuhi permintaan produksi kertas yang tinggi.

Selain itu, masih belum ada perhatian yang memadai terhadap bagaimana mendaur ulang kertas dengan cara yang ramah lingkungan. Di Indonesia, isu pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 yang berhubungan dengan Omnibus Law dan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 mengenai (Hartono et al., 2020). Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kerangka regulasi ini, tanggung jawab produsen diatur

secara rinci, khususnya dalam Undang-Undang 18/2008 Pasal 15. Pasal ini mengamanatkan bahwa produsen harus mengelola kemasan atau barang yang diproduksi jika tidak dapat atau sulit terurai secara alami. Aturan lain seperti Peraturan Pemerintah 81/2012 juga mewajibkan produsen untuk mengembangkan rencana atau program pengurangan timbulan sampah sebagai bagian dari upaya mereka dalam menghasilkan produk dengan kemasan yang mudah terurai secara alami dan menghasilkan sedikit sampah (Da Costa, 2018).

Sebagai contoh positif, penggunaan kemasan galon untuk air mineral yang dapat digunakan kembali oleh konsumen adalah suatu langkah yang baik dalam pengelolaan sampah (Widyaningsih & Ma'ruf, 2017). Namun, ada beberapa kendala dalam regulasi ini. Meskipun aturan-aturan ini telah ditetapkan, masih ada kekurangan dalam hal pelaksanaan dan sanksi bagi produsen yang tidak memenuhi tanggung jawab mereka dalam pengelolaan sampah.

Beberapa peraturan juga cenderung memfokuskan pada aspek daur ulang dan potensi daur ulang kemasan plastik sekali pakai. Namun, implementasi dari proses daur ulang sampah sendiri telah memunculkan permasalahan baru, seperti risiko kesehatan bagi pemulung yang terpapar langsung dengan sampah dan kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja di industri daur ulang (Sari et al., 2020). Oleh karena itu, perlu ada sistem regulasi yang mengatur

pemulung sebagai bagian dari produsen atau perusahaan daur ulang, dan menghindari impor bahan baku sampah plastik untuk daur ulang.

3. Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pada akhir 1980-an, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan memberikan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merugikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Butlin, 1989) (Situmeang 2021). Sejak itu, ide pembangunan berkelanjutan telah menarik perhatian komunitas global di tingkat lokal, nasional, dan internasional karena kekhawatiran terkait dengan perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, deforestasi tropis, dan tantangan degradasi lingkungan lainnya (Daryono 2023). Pada tahun 2009, Indonesia mengatur konsep pembangunan berkelanjutan melalui Undang-Undang No. 32. Definisi pembangunan berkelanjutan dalam UU tersebut adalah proses yang disengaja dan terencana yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam rencana pembangunan guna memastikan keberlangsungan lingkungan hidup serta kesejahteraan, keselamatan, dan kualitas hidup bagi generasi saat ini dan masa depan (Republik Indonesia, 2009). (Sutrisno, 2018).

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan tiga aspek utama: ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang sering disebut sebagai *Triple*

Bottom Line (TBL). Ketiga dimensi ini digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan secara integral terhubung dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sebuah inisiatif global yang disetujui oleh pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi disparitas, dan menjaga lingkungan. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 (*United Nations Department of Economic and Social Affairs*).

Menurut Alfa (2019) didalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terdapat ada 17 tujuan yaitu :

1. Tanpa kemiskinan, memberantas segala bentuk kemiskinan dimana-mana.
2. Tanpa kelaparan, mencapai ketahanan dan peningkatan pangan, serta membangkitkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, mengiatkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua kalangan usia.
4. Pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang memadai dan inklusif serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
5. Kesetaraan gender, adanya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi yang layak, memastikan akses terhadap air dan sanitasi untuk semua.

7. Energi bersih dan terjangkau, memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.
8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, Lebih sedikit pengurangan di dalam dan antar negara.
11. Kota dan komunikasi berkelanjutan, menjadikan kota yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan berkelanjutan.
13. Menangani perubahan iklim, ambil langkah penting untuk melawan dampak dan perubahan iklim.
14. Ekosistem laut, perlindungan dan pemanfaatan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan.
15. Ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan konversi lahan menjadi gurun, menghentikan kepunahan Keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat mendorong masyarakat yang adil, damai dan inklusif.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

a. Tata Kelola Sampah Berkelanjutan konteks Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Permasalahan sampah menjadi fokus perhatian pemerintah kota dalam rangka mencapai Goals 11 dari SDGs, yang bertujuan untuk menciptakan kota yang inklusif, aman, berkelanjutan, dan berdaya tahan. Salah satu target konkret dari Goal 11 adalah upaya untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan perkapita dengan meningkatkan kualitas air dan tata kelola pengelolaan sampah pada tahun 2030 (*Sustainable Development Goals, United Nations Secretariat dalam Entaresmen, 2022*) (Mayarni 2020).

Dalam konteks ini, tata kelola sampah berkelanjutan menjadi kunci dalam mengelola masalah sampah secara efektif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan kota yang diinginkan. Pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai ‘pintu masuk’ untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan isu multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola terdiri

atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak negatif (Aulia 2021). Pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai berbagai target pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks Tanggung Jawab Konsumsi dan Produksi, sebagaimana dalam tujuan SDGs 12. Ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab atas pola konsumsi dan produksi yang telah dilakukan. Konsumsi yang berlebih tentunya akan menghasilkan sampah yang berlebih sehingga memengaruhi luasan tempat pembuangan sampah yang ada.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang lingkungan, penerapan sistem pengelolaan sampah yang memperhatikan aspek lingkungan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kota berkelanjutan. Dengan menerapkan pengelolaan sampah yang memperhatikan lingkungan, dapat tercipta lingkungan yang sehat dan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan memiliki potensi untuk mempengaruhi pencapaian target SDGs, khususnya SDGs tujuan ke 11 dan 12.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir memiliki peran sentral sebagai fondasi atau dasar dalam mengembangkan berbagai konsep yang berasal dari teori yang diterapkan dalam suatu penelitian. Kerangka pemikiran juga berfungsi untuk

menghubungkan teori-teori tersebut dengan perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian (Hermawan, 2019).

Dalam usaha menangani tata kelola sampah, peran pemerintah memiliki posisi sentral yang mencakup langkah-langkah seperti mendorong pertumbuhan sektor dan aktivitas yang mendukung, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelaksanaan pengelolaan sampah di suatu wilayah (Kamil, 2018). Langkah ini sesuai dengan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, di mana mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Mengacu pada prinsip kolaborasi, kolaborasi adalah suatu usaha untuk menggabungkan berbagai sektor, termasuk pemerintah dan non-pemerintah, dalam rangka mengelola, merancang, dan mengatur berbagai hal secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif (Buana, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai model *collaborative governance* yang diterapkan dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.

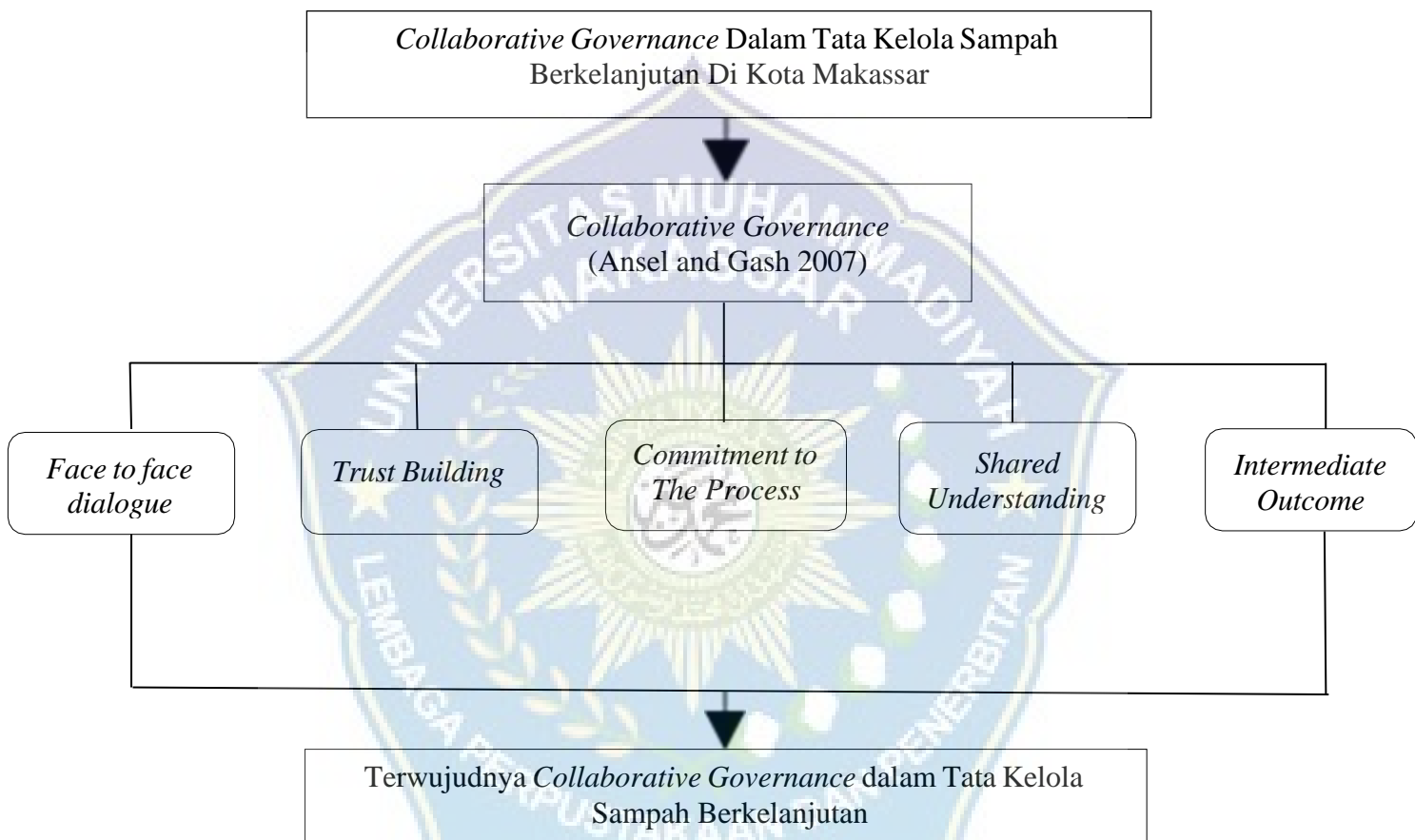
Terdapat 5 item penting untuk mengukur keberhasilan kolaborasi dalam *governance*, yaitu meliputi:

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)
2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)
3. *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses)
4. *Shared Understanding* (pemahaman bersama)
5. *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai)

Maka penulis menggambarkan bagan kerangka pikir berdasarkan *collaborative Governance* menurut (Ansel and Gash 2007)

Gambar 2.2

Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan. Penelitian ini akan berfokus pada kolaborasi tingkat kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri dan Masyarakat, Dalam upaya tata kelola sampah berkelanjutan.

Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kolaborasi di antara aktor-aktor ini telah berjalan lancar ataukah terhambat oleh beberapa faktor.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka). Pertemuan tatap muka yang dilakukan secara langsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, masyarakat, dan yayasan peduli negeri, bertujuan untuk menyatukan visi dan tujuan bersama dalam upaya meningkatkan perkembangan tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.
2. *Trust Building* (membangun kepercayaan). Membangun kepercayaan antara Dinas lingkungan hidup Kota Makassar dan masyarakat sangat penting, di mana keduanya perlu memiliki kepercayaan dan dukungan satu sama lain dalam rangka mencapai kesuksesan dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.
3. *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses). Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan sektor swasta telah bersama-sama berkomitmen sejak awal untuk mengatasi isu-isu dalam tata kelola sampah berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memberikan dukungan kepada setiap program yang telah dirancang sebagai wujud komitmen mereka dalam pengembangannya dalam mewujudkan tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.
4. *Shared Understanding* (pemahaman bersama). untuk menilai sejauh mana proses kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan

Peduli Negeri dan masyarakat untuk membantu pengembangan dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.

5. *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai). Hasil yang dicapai melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri dan masyarakat akan memberikan motivasi kepada pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu dalam penelitian. Adapun waktu penelitian yang akan ditempuh yaitu dua (2) bulan mulai 03 Januari 2024 hingga 02 Februari 2024

Lokasi penelitian yang menjadi fokus adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Alasan utama pemilihan objek lokasi penelitian ini adalah karena menjadi lingkungan yang relevan untuk mengkaji konsep *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Tipe Penelitian

Adapun pada tipe penelitian ini, menggunakan penelitian deskriptif yaitu fokus diberikan pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Penelitian deskriptif juga sangat sesuai untuk menggali pandangan dan persepsi dari berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola sampah berkelanjutan. Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pemangku kepentingan tersebut berkontribusi dalam kolaborasi, serta kendala atau masalah yang mereka hadapi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sejalan dengan tujuan untuk melihat *collaborative governance* dalam konteks tata kelola sampah berkelanjutan. Penelitian kualitatif juga memiliki karakteristik yang sangat relevan untuk tujuan penelitian ini. Salah satu karakteristik utama penelitian kualitatif adalah kemampuannya untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan dan penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi beragam pandangan, pendapat, dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola sampah. Ini sangat penting karena *collaborative governance* sering melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda-beda.

C. Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian “*Collaborative Governance* Dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan di Kota Makassar” menggunakan teknik pengambilan informan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian. Peneliti telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu :

Tabel 3.1
Tabel Informan

NO	INFORMAN	INISIAL	JABATAN
1.	Kahfiani, S.Hut	KF	Kepala subbagian persampahan, Limbah B3, Kapasitas dana peningkatan
2.	Saharuddin Ridwan S.S., M.M	SR	Direktur eksekutif yayasan peduli negeri
3.	Shamsu Bahri	SB	Masyarakat (Tukang Sampah)
4.	H.Nambun	H.N	Masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

1. *Observasi* (pengamatan langsung) Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan pencatatan terhadap permasalahan yang terkait dengan upaya kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.
2. *Interview* (wawancara), dimana peneliti berinteraksi dengan informan yang akan melibatkan penyusunan pedoman wawancara yang relevan dengan tujuan penelitian dan terkait dengan obyek penelitian tersebut. Pedoman wawancara ini akan membimbing peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari para informan.
3. Dokumentasi, teknik untuk mengumpulkan data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan

dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang aspek-aspek keberhasilan *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.

E. Teknik Pengabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membanding apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu

kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh dikantor dinas lingkungan hidup dan beberapa pemangku kepentingan yang berkolaborasi valid

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Suwerda, 2019). Hal-hal yang dilakukan dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi data (*data reduction*), Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi dan fokus terhadap data kasar yang telah diperoleh, dengan tujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data tersebut.
2. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Tujuan dari deskripsi objek penelitian ini adalah memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hasil penelitian, dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang objek penelitian. Selain itu, pembahasan ini juga disajikan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.

1. Kota Makassar

Makassar, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Sebelumnya, kota ini dikenal resmi sebagai Ujung Pandang dari tahun 1971 hingga 1999 dan merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur. Kota ini juga menjadi pusat kota terbesar ketujuh di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk, setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang. Terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, Makassar menghadap Selat Makassar. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Makassar atau MANGKASARAK (paling dominan), serta terdapat pendatang dari berbagai suku seperti Bugis, Jawa, Mandar, Toraja, Sunda, Tionghoa, dan lainnya. Kota ini berada di koordinat 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°8'6"19" Lintang Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah Utara dan Timur, Kabupaten Gowa di sebelah Selatan, serta Selat Makassar di sebelah Barat. Dengan topografi

datar hingga bergelombang (kemiringan lahan 0-2° dan 3-15°), luas wilayah Kota Makassar mencapai 175,77 km persegi. Iklim kota ini berada dalam kisaran sedang hingga tropis, dengan suhu udara rata-rata antara 26°C hingga 29°C.

Makassar, yang dikenal sebagai "Waterfront City," terletak dekat dengan pantai yang membentang di sepanjang koridor barat dan utara. Kota ini dilintasi oleh beberapa sungai, seperti Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang, yang semuanya bermuara ke dalam kota. Kota ini terletak pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut, sehingga sering mengalami genangan air saat musim hujan, terutama ketika hujan bersamaan dengan air pasang.

Dari segi administratif, Kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Tujuh kecamatan di antaranya berbatasan langsung dengan pantai, yaitu Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya. Batas administratif Kota Makassar mencakup:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Dari segi topografi secara umum, Kota Makassar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Bagian Barat ke arah Utara, yang relatif rendah dan dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur, yang memiliki topografi berbukit, seperti yang terlihat di Kelurahan Antang, Kecamatan Panakukang.
- c.

Gambar 4.1
Peta Kota Makassar Tahun 2024



Sumber: Website Kota Makassar 2024.

Menurut Bappenas, Makassar termasuk salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya. Dengan luas wilayah mencapai 175,77 km² dan jumlah penduduk melebihi 1,4 juta jiwa, kota ini menduduki peringkat ketujuh sebagai kota terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk, setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang. Beberapa makanan khas Makassar yang populer di berbagai wilayah kota termasuk Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Bassang, Kue Tori, Pallu Butung, Pisang Ijo, Sop Saudara, dan Sop Konro.

Kota Makassar memiliki iklim tropis muson, yang ditandai oleh perbedaan yang signifikan dalam jumlah curah hujan antara musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi dari bulan November hingga Maret, sementara musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga September. Suhu udara rata-rata di wilayah Kota Makassar berkisar antara 26°C hingga 29°C. Curah hujan tahunan rata-rata di kota ini berkisar antara 2700 hingga 3200 milimeter.

2. Dinas Lingkungan Hidup

a. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk merawat keindahan Kota Makassar, khususnya dalam pengelolaan lingkungan. Pasal 1 butir 9 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 menegaskan

bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di sektor lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), dibagi menjadi beberapa tipe yaitu ;

- a. Tipe A mencakup pekerjaan dengan skala besar; terdiri dari satu sekretariat dan maksimal empat bidang.
- b. Tipe B mencakup pekerjaan dengan skala menengah; terdiri dari satu sekretariat dan maksimal tiga bidang.
- c. Tipe C mencakup pekerjaan dengan skala kecil; terdiri dari satu sekretariat dan maksimal dua bidang.

Dalam Ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam kategori tipe A. Pasal 20 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab membantu Walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang merupakan kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala daerah.

Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki tugas dan wewenang yang meliputi:

- 1) Menetapkan kebijakan di tingkat Provinsi
- 2) Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi
- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait RPPLH Provinsi
- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait AMDAL dan UKL-UPL
- 5) Melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di tingkat Provinsi
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama serta kemitraan
- 7) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 10) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup

- 11) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama serta penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa
 - 12) Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan
 - 13) Melaksanakan standar pelayanan minimal
 - 14) Menetapkan kebijakan tentang tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi
 - 15) Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup
 - 16) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan
 - 17) Menerbitkan izin lingkungan di tingkat Provinsi
 - 18) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di tingkat Provinsi
- b. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki visi untuk
"Mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia yang Berwawasan Lingkungan."
- 2) Guna meraih visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota

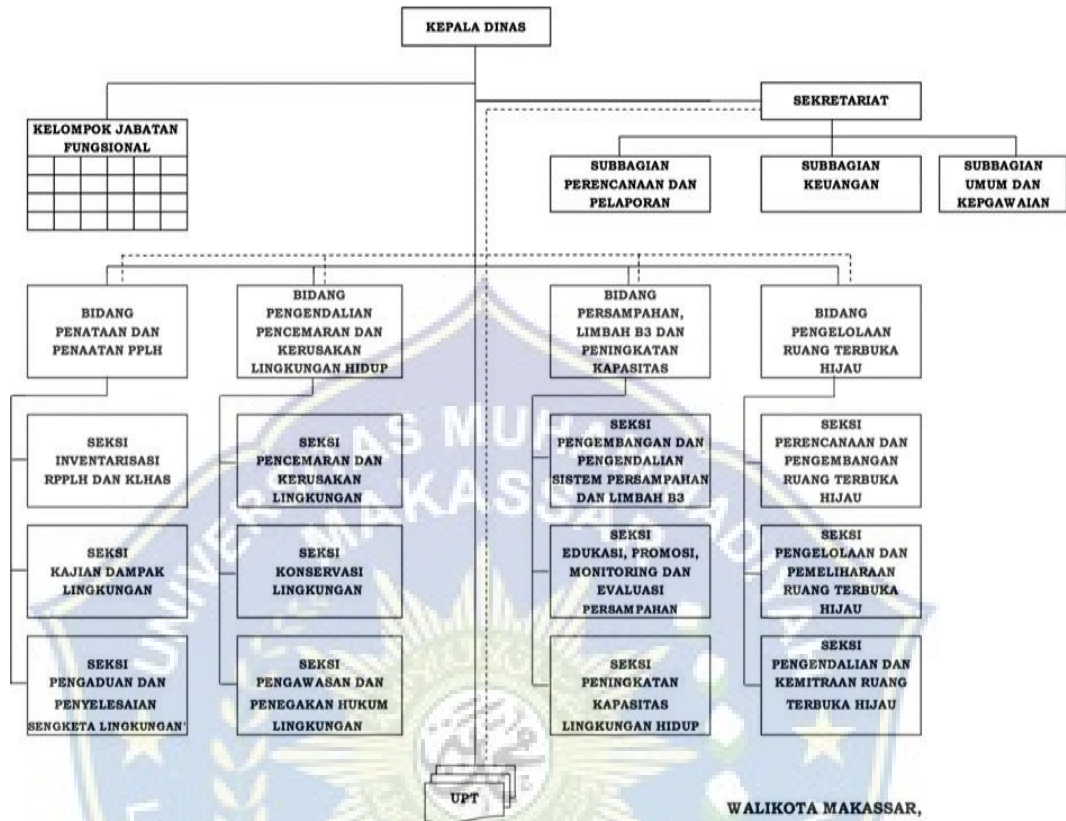
Makassar menetapkan sejumlah misi yang meliputi:

- a) Meningkatkan kompetensi teknis personel Badan Lingkungan Hidup Daerah melalui peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan, serta pembenahan sarana dan prasarana.
- b) Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat guna memastikan terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat.
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan ditingkatkan melalui berbagai langkah yang mendukung keterlibatan dan partisipasi aktif dari pihak masyarakat.

c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab membantu walikota dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 2024.

Dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tugas dari setiap Bagian, Sub bagian, dan Bidang adalah sebagai berikut:

Sekretariat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan, dan menyediakan layanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat juga mengawasi 3 sub bagian, yakni Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Dalam konteks ini, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

memiliki tanggung jawab untuk menyusun bahan koordinasi, merancang rencana program kerja, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. Selanjutnya, Subbagian Keuangan bertugas dalam melakukan administrasi dan akuntansi keuangan, sementara Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas untuk menangani urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi, inventarisasi barang, dan administrasi kepegawaian.

Selain bagian sekretariat dan subbagiannya, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup juga mencakup empat bidang, dan setiap bidang memiliki seksi-seksi yang masing-masing memiliki tanggung jawab, yakni: Bidang Penataan dan Penataan PPLH memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan bahan formulasi kebijakan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Bidang Penataan dan Penataan PPLH terbagi menjadi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHAS) mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan inventarisasi data informasi sumberdaya alam dan menyusun RPPLH dan KLHS.
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan kajian dampak lingkungan.

- 3) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Selanjutnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan bahan Penyusunan kebijakan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terdapat tiga seksi dengan tugas masing-masing, yaitu:

- 1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses bahan tentang pencemaran lingkungan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- 2) Seksi Konservasi Lingkungan bertugas untuk mengumpulkan dan memproses bahan konservasi lingkungan.
- 3) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses bahan tentang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Bidang yang ketiga adalah Bidang Persampahan, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas, yang memiliki tugas untuk menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan persampahan, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta peningkatan kapasitas lingkungan. Bidang ini terdiri dari tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah B3 bertanggung jawab untuk menyusun bahan kebijakan mengenai
- 2) Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring, dan Evaluasi Persampahan memiliki tanggung jawab untuk menyusun bahan pembinaan dalam hal edukasi, promosi, monitoring, dan evaluasi dalam konteks persampahan.
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup bertugas untuk mengumpulkan dan memproses bahan terkait peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang terakhir adalah Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam bidang ini, terdapat tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau memiliki tugas untuk melakukan perencanaan dan pengembangan ruang terbuka hijau.
- 2) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- 3) Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau memiliki tugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dalam pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

B. Hasil Penelitian

***Collaborative Governance* dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan di Kota Makassar**

Collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif adalah suatu pendekatan dalam mengelola permasalahan atau isu tertentu yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan. Dalam konteks tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar, *collaborative governance* dapat diimplementasikan untuk memastikan keterlibatan antara pemerintah daerah, swasta, masyarakat maupun organisasi non-pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sampah.

Tabel 4.1
Unsur Kolaborasi Pemerintah, swasta, dan masyarakat

Unsur -Unsur		Peran
Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar	Menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan persampahan, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan.
Swasta	Yayasan Peduli Negeri	Meningkatkan dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah
	Pt. Unilever	Memberikan pendanaan dalam peningkatan pengelolaan sampah dari sumber melalui bank sampah, dan mendukung program pemerintah melalui bank sampah

	<i>Save the Children</i>	Membantu di bidang sampah elektronik, dalam kerangka menunjang agenda pembangunan berkelanjutan.
Masyarakat	Tukang sampah	Bertanggung jawab akan kebersihan
	Bank Sampah	Membantu pengelolaan sampah

Dalam tata kelola sampah berkelanjutan perlu adanya kolaborasi untuk mencapai keberhasilan. Berdasarkan konsep kolaborasi, mencakup usaha untuk menyatukan semua sektor, termasuk sektor pemerintahan dan non-pemerintah, guna mengelola dan merancang tata kelola secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu bekerja sama dengan Yayasan Peduli Negeri yaitu dengan pengelolaan TP3R Untia bersama dengan melibatkan masyarakat. Seperti halnya yang dikatakan oleh subbagian Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, bahwa:

“Kerja sama yang dilakukan oleh DLH bersma YPN yaitu hubungan yang positif dengan YPN dalam budidaya maggot menjadi pendorong utama pengurangan sampah organik yang berlokasi di Paccerakang dengan melibatkan masyarakat” (Wawancara dengan KF, 17 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Yayasan peduli Negeri merupakan wujud kolaborasi dengan melibatkan partisipasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan tujuan mencapai kesuksesan yang diinginkan. Maka dalam penelitian ini

akan diuraikan *Collaborative Governance* dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan di Kota Makassar menggunakan indikator Ansell & Gash (2007) Terdapat 5 indikator penting untuk mengukur keberhasilan *Collaborative Governance*, yaitu meliputi: dialog tatap muka membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil akhir yang dicapai . Adapun hasil yang diperoleh dari lapangan dengan memanfaatkan sejumlah indikator tersebut dikumpulkan melalui pendekatan penelitian kualitatif . Diuraikan sebagai berikut:

1) **Dialog tatap muka**

Dialog tatap muka adalah salah satu kolaborasi untuk mencapai tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar. Melalui dialog tatap muka untuk tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar, interaksi terjadi secara langsung melalui pertemuan tatap muka antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri dan masyarakat menjadi penunjuk atau kunci untuk memastikan adanya kerja sama yang efisien dalam merancang kebijakan serta melakukan tindakan bersama guna mencapai tata kelola sampah berkelanjutan. Adapun hasil dari dialog tatap muka yang dilakukan penulis dengan informan salah satu subbidang bagian Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, sebagai berikut:

“Dengan dialog tatap muka sangat ini efektif untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi antara DLH Kota Makassar dan pihak swasta maupun masyarakat. Dengan dilaksanakannya dialog tatap muka, agenda dapat disampaikan dengan maksimal dan target dari pertemuan tersebut dapat tercapai” (Wawancara dengan KF, 17 Januari 2024)

Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa dengan adanya dialog tatap muka ini menjadi salah satu kolaborasi yang sangat efektif untuk menjalankan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dengan Yayasan Peduli Negeri maupun masyarakat. Dengan adanya dialog tatap muka memberikan peluang untuk berkomunikasi secara terbuka dan langsung antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan mengenai tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar. Seperti halnya yang di jelaskan oleh direktur eksekutif Yayasan Peduli Negeri mengatakan bahwa:

“Adanya dialog tatap muka untuk mencapai tata kelola sampah yang berkelanjutan adalah memfasilitasi diskusi . Setiap bulan dilakukan 2-3 kali pertemuan dengan pihak DLH. Dalam forum, YPN, DLH maupun masyarakat dapat melakukan pertukaran informasi, seperti membicarakan persoalan sampah dan memberikan ide-ide terkait pengelolaan sampah itu sendiri, dan merumuskan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Selain itu, dialog tatap muka juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait masalah sampah”. (Wawancara dengan SR, 22 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam dialog tatap muka yang dilakukan oleh D/inas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Yayasan Peduli Negeri menunjukkan bentuk kerjasama yang dilakukan setiap bulan dengan 2-3 kali pertemuan. Dialog tatap muka terbukti menjadi alat yang efektif untuk memfasilitasi pembahasan antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks

tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri dan masyarakat dapat melakukan pertukaran informasi, mengenai ide-ide pengelolaan sampah dan bentuk pelaksanaan pendampingan terkait data-data persampahan . Selain itu, dialog tersebut memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta memperkuat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait isu tersebut.

Terkait dengan pembahasan diatas, saat terjalannya dialog tatap muka, salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

“Saat berjalannya dialog ini yang dibahas itu bagaimana partisipasi untuk pengelolaan sampah dan apa fungsi bank sampah itu sendiri” (Wawancara dengan SB, 30 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam dialog tatap muka antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, yayasan Peduli negeri, dan masyarakat, pembahasan terfokus pada penilaian sejauh mana para pemangku kepentingan mencapai hasil dari dialog tersebut. Selain itu, mereka juga mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap keberhasilan mencapai tata kelola sampah yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, para pihak secara aktif menggagas solusi dan strategi untuk memastikan pencapaian tujuan terkait tata kelola sampah.

2) Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan dalam konteks "*collaborative governance*" untuk tata kelola sampah berkelanjutan adalah langkah krusial dalam mencapai kesuksesan upaya mencapai tata kelola sampah secara berkelanjutan. Salah satu kunci dari kolaborasi adalah membangun kepercayaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Membangun kepercayaan melibatkan penyampaian dengan jujur dan transparan semua informasi yang relevan terkait tujuan, proses, maupun keputusan yang diambil. Dengan terciptanya kepercayaan yang kuat antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri dan masyarakat kolaborasi dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung tata kelola sampah berkelanjutan, dengan dampak yang lebih baik dan berkelanjutan. Sebagaimana yang ditemukan dalam wawancara dengan Kepala subbagian Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mengatakan bahwa:

“Kepercayaan menjadi aset kunci dalam melaksanakan *collaborative governance* karena setiap pihak memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi demi mencapai tujuan utama. Evaluasi dan pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk mempertahankan kepercayaan dari sektor swasta dan masyarakat”. (Wawancara dengan KF, 17 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan evaluasi, yang diekspresikan melalui pelaporan, menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar kepada yayasan peduli negeri dan masyarakat. Langkah ini diambil untuk membangun kepercayaan dalam upaya mencapai tujuan

tata kelola sampah berkelanjutan. Terkait dengan pembahasan diatas, oleh karena itu, direktur eksekutif Yayasan Peduli Negeri mengatakan bahwa:

“Dalam upaya membangun kepercayaan di tingkat lokal, Yayasan Peduli Negeri secara konsisten melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait tata kelola sampah. Menurut saya terdapat sejumlah perilaku yang telah diadopsi oleh masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah. Contohnya adalah aktivitas yang umum dilakukan oleh individu dalam mengelola sampah melibatkan penggunaan tas belanja pribadi, membawa botol minum sendiri, membawa wadah makanan pribadi, melakukan daur ulang sampah plastik”. (Wawancara bersama SR, 22 Januari 2024).

Tidak hanya itu, Yayasan Peduli Negeri juga menyatakan bahwa sebagai bagian dari inisiatif membangun kepercayaan, mereka menyelenggarakan program pelatihan khusus bagi pihak-pihak yang terlibat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap upaya kolaboratif dalam tata kelola sampah berkelanjutan. Berikut kutipan wawancara penulis bersama kepala direktur eksekutif Yayasan Peduli Negeri:

“dalam pelatihan khusus ada beberapa program yaitu, Memberikan pelatihan kepada pembimbing lingkungan yang kami pilih setiap tahun sebagai bagian dari pelatihan untuk pelatih, Melakukan pelatihan mengenai manajemen sampah sendiri untuk masyarakat, khususnya yang berpotensi menjadi pembimbing lingkungan dan Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kebijakan di tingkat RT/RW, kelurahan, dan kecamatan”. (Wawancara bersama SR, 22 Januari 2024).

Gambar 4.3
Pelatihan khusus kepada masyarakat



Sumber: Yayasan Peduli Negeri 2024

Berdasarkan pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh Yayasan Peduli Negeri bersama masyarakat memiliki tujuan membangun kepercayaan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program dan pelatihan yang diselenggarakan oleh yayasan peduli negeri untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat.

Untuk membangun kepercayaan dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam program pelatihan. Selain itu, melihat bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap isu-isu yang dihadapi dan kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi dengan solusi yang bermanfaat juga menjadi salah satu faktor yang relevan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui evaluasi partisipasi dalam kegiatan

pengelolaan sampah dan keterlibatan masyarakat membangun kepercayaan dengan menjaga tingkat lingkungan sekitar. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kepercayaan saya kepada pemerintah maupun swasta itu contohnya dengan melibatkan kami tentang sosialisasi. Dengan diberikan kepercayaan tersebut maka kami sebagai masyarakat harus ikut serta apabila ada sosialisasinya”. (Wawancara bersama H. N, 01 Februari 2024).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kepercayaan adalah fondasi utama bagi kolaborasi yang berhasil antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemberian kepercayaan dari pemerintah dan sektor swasta kepada masyarakat, dan sebaliknya, menciptakan ikatan saling menguntungkan yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosialisasi. Dengan adanya kepercayaan, terbentuklah hubungan yang positif dan produktif yang membawa dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

3) **Komitmen Terhadap Proses**

Kunci dalam *collaborative governance* adalah komitmen terhadap proses, yang tercermin dalam keterlibatan aktif Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat. Keberhasilan kolaborasi bergantung pada sejauh mana setiap pihak berkomitmen untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar perlu menunjukkan komitmen dalam menyediakan informasi yang transparan, sementara Yayasan Peduli Negeri harus memastikan

dukungan berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat perlu berkomitmen untuk aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Komitmen bersama terhadap proses menjadi fondasi penting untuk membangun kolaborasi yang efektif dalam upaya bersama.

Komitmen bersama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan Masyarakat terhadap proses tidak hanya menjadi dasar penting untuk membangun hubungan kerjasama yang kokoh, tetapi juga mendukung kelangsungan kerja kolaborasi yang efisien. Partisipasi yang konsisten dari semua pihak menciptakan lingkungan di mana aliran informasi berjalan lancar, keputusan dapat diambil secara bersama-sama, dan program dapat dijalankan dengan efisiensi. Dengan demikian, dalam upaya bersama ini, komitmen bersama terhadap proses menjadi elemen kunci untuk mencapai hasil yang positif dan berlanjut.

Untuk melihat tolak ukur dari keberhasilan komitmen yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dengan Yayasan peduli Negeri maupun masyarakat agar terciptanya kolaborasi mencapai tata kelola sampah berkelanjutan. Berikut kutipan wawancara bersama Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Negeri :

“Beberapa tolak ukur dapat dilihat dari regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah kota makassar untuk mendukung kelangsungan program pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, Komitmen pemerintah kota dalam alokasi anggaran untuk semua tahap pengelolaan sampah, termasuk sarana, prasarana, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Kelangsungan lembaga Bank Sampah di tingkat induk dan unit Bank Sampah, Kegiatan penimbangan yang dilakukan di

setiap unit Bank Sampah Jumlah nasabah dan aktifitas Bank Sampah di setiap RW” (Wawancara bersama SR, 22 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa pemerintah kota Makassar telah menegaskan komitmennya yang kuat terhadap kelangsungan program pengelolaan sampah untuk mencapai tujuan akhir. Ini tercermin dari penerapan regulasi yang tepat dan alokasi anggaran yang memadai untuk semua tahapan pengelolaan sampah.

Setiap komitmen yang dibangun oleh pemangku kepentingan tentunya tidak terlepas dari hambatan dalam membangun maupun mempertahankan komitmen untuk mencapai kolaborasi antara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap yayasan peduli negeri.

Hambatan yang terjalin selama dalam kolaborasi menjadi diperkuat dengan wawacara bersama ketua subbagian persampahan, limbah B3, peningkatan dan kapasitas, Mengatakan bahwa:

“Yang menjadi hambatan itu komunikasi kadang-kadang terbatas hanya pada segelintir individu dari Yayasan Peduli Negeri, dan jika terjadi pergantian personel, komunikasi tersebut bisa terhenti. Namun, koordinasi secara teratur tetap dilakukan untuk memelihara hubungan yang baik dan menjaga silaturahmi yang terjalin”. (Wawancara bersama KF, 17 Januari 2024).

Dari hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah terbatasnya komunikasi dengan setiap individu dari Yayasan Peduli Negeri. Pergantian personel menjadi faktor yang dapat menghentikan komunikasi tersebut. Akan tetapi, upaya mengatasi hambatan dalam koordinasi secara berkala tetap dilakukan

untuk menjaga hubungan yang baik dan mempertahankan komitmen antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Yayasan Peduli Negeri. Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh Kepala Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Negeri mengatakan bahwa:

“Untuk mengatasi potensi hambatan atau tantangan yang menghalangi komitmen dengan dinas lingkungan hidup maupun dengan masyarakat terlibat dalam tata kelola sampah berkelanjutan, ada beberapa strategi yang kita diterapkan yaitu; Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam memperkuat komitmen terhadap tata kelola sampah yang berkelanjutan, dan Pentingnya regulasi yang jelas dan efektif tidak dapat diabaikan dalam tata kelola sampah berkelanjutan”. (Wawancara bersama SR, 22 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang menghalangi komitmen dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan masyarakat terlibat dalam tata kelola sampah berkelanjutan, beberapa strategi dapat diidentifikasi. Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat komitmen terhadap tata kelola sampah yang berkelanjutan.

Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, diperlukan penguatan komitmen dari masyarakat. Dengan partisipasi yang aktif dan kesadaran yang tinggi, masyarakat dapat menjadi kekuatan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mewujudkan tata kelola sampah yang berkelanjutan. Dengan memperkuat pemahaman akan pentingnya praktik-praktik pengelolaan sampah yang baik, serta mengajak

dukungan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk menangani masalah sampah.

“keterlibatan mungkin seperti mengikuti sosialisasinya seperti apa itu pengelolaan sampahnya, bagaimana cara pengumpulan sampahnya”. (Wawancara bersama H. N, 01 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam kolaborasi dengan membangun komitmen dalam upaya pengelolaan sampah dengan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar maupun pihak Yayasan Peduli Negeri.

Pernyataan yang serupa juga disampaikan saat wawancara bersama masyarakat yang lain, berikut kutipan wawancaranya:

“keterlibatan saya itu sebagai petugas kebersihan yang kerjanya sebagai tukang angkut sampah”. (Wawancara bersama SB, 30 Januari 2024).

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran yang besar untuk mencapai komitmen yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri kepada Masyarakat. Pentingnya dalam keterlibatan setiap individu, adalah upaya bersama untuk mencapai komitmen yang baik untuk mencapai lingkungan yang lebih baik.

4) Pemahaman Bersama

Pentingnya pemahaman bersama dalam hal ini untuk menciptakan kolaborasi yang efektif antara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri dan masyarakat terkait. Sehingga

upaya untuk mencapai tata kelola sampah dapat berjalan dengan efisien dan berhasil. Dengan pemahaman bersama, pihak-pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan mencapai tata kelola sampah berkelanjutan maupun peran masing-masing serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

Melalui keterlibatan aktif dan dukungan berkelanjutan yang diberikan oleh Yayasan Peduli Negeri kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mampu menciptakan pemahaman dan membangun hubungan bersama untuk mencapai tata kelola sampah yang baik. Sebagaimana pernyataan dari kepala direktur eksekutif Yayasan Peduli Negeri mengatakan bahwa:

“Yayasan Peduli Negeri sebagai mitra, dimana kami memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemerintah Kota Makassar, terutama DLH. Salah satu sumbangannya adalah dalam pembinaan bank sampah di tiap RW, yang menyebabkan DLH merekrut pengelola bank sampah sebagai motivator di 15 kecamatan sejak tahun lalu. Selain itu, YPN juga memberikan masukan mengenai sistem pengelolaan sampah skala kota”. (Wawancara bersama SR, 22 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa Yayasan Peduli Negeri telah menjadi mitra yang signifikan bagi pemerintah Kota Makassar, terutama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Perannya terutama terlihat dalam pembinaan bank sampah di setiap RW, yang mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup merekrut pengelola bank sampah sebagai motivator di 15 kecamatan sejak tahun sebelumnya. Selain itu, Yayasan Peduli Negeri juga memberikan masukan mengenai sistem pengelolaan sampah di skala kota.

Melalui pemahaman yang terus-menerus, kolaborasi antara Yayasan Peduli Negeri dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tidak hanya membangun fondasi yang kuat. Akan tetapi, keberlangsungan dari pemahaman bersama menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar perlu memastikan bahwa terjalinnya kerja sama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Yayasan Peduli Negeri. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sub bagian persampahan, limbah B3, dan peningkatan kapasitas mengatakan bahwa:

“kita menjalankan kerja sama selalu memastikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan atau program, selalu terdapat indikator yang harus dicapai. Ketika indikator-indikator tersebut terpenuhi, tujuan akhir dari suatu program dapat tercapai. Salah satu maksud dari koordinasi adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman tentang indikator yang harus dicapai”. (Wawancara bersama KF, 17 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya indikator yang dicapai untuk membentuk pemahaman bersama dalam menjalankan kerja sama dan pelaksanaan kegiatan atau program. Koordinasi antar pihak juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan berkomitmen terhadap tujuan bersama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Masyarakat mengatakan bahwa:

“setiap tahun pemerintah itu datang ajak masyarakat untuk berikan pemahaman bersama soal sampah atau ikut sosialisasinya”. (Wawancara bersama H.N 02 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemahaman bersama, memperkuat kerja sama, dan meningkatkan peluang mencapai tata kelola sampah berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk secara aktif terlibat dalam proses koordinasi, memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan efisien dan efektif.

5) Hasil akhir dicapai

Hasil akhir dicapai merupakan indikator terakhir dalam kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri dan masyarakat. Indikator ini menjadi output dalam proses kolaborasi untuk mencapai tata kelola sampah berkelanjutan. Hasil sementara tidak hanya penting untuk menilai kemajuan program secara menyeluruh, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan memperbaiki proses kolaborasi itu sendiri.

Dalam konteks kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat dalam tata kelola sampah, hasil sementara menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa upaya bersama ini berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk menilai dari hasil akhir yang dicapai yang dijalankan oleh pihak pemerintah bersama swasta dan masyarakat untuk mencapai tata kelola sampah yang baik dapat dilihat dengan tolak ukur keberhasilan dari indikator kinerja. Sebagaimana yang dikatakan oleh

kepala subbagian Persampahan, Limbah B3, Peningkatan dan kapasitas, mengatakan bahwa:

“Ada indikator kinerja yang harus dicapai yaitu, indikator penyusunan kebijakan, indikator penanganan sampah 70% di tahun 2025, indikator pengurangan sampah 30% di tahun 2025 dan indikator-indikator lain terkait koordinasi dan konsultasi dengan pihak yayasan peduli negeri dan masyarakat”. (Wawancara bersama KF, 17 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa indikator kinerja dalam menilai kesuksesan kolaborasi tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar, seperti penyusunan kebijakan, penanganan sampah, dan pengurangan sampah menjadi tolok ukur yang jelas untuk mengevaluasi kemajuan program. Dengan adanya target yang spesifik, seperti menangani 70% sampah dan mengurangi 30% sampah pada tahun 2025, terciptanya landasan yang kuat untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian dalam pelaksanaan program. Selain itu, indikator terkait koordinasi dan konsultasi dengan pihak swasta dan masyarakat menunjukkan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi.

Terjalannya kolaborasi yang baik dengan pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang diinginkan, tentunya tidak terlepas dari peran dari masyarakat untuk mencapai hasil yang dicapai. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh masyarakat:

“keterlibatan saya untuk hasil yang dicapai itu lebih kepada bank sampah itu sendiri, membantu untuk pemilahan sampah dari sumber rumah tangga dan pengurangan sampah dari bank sampah unit. Saya juga mempunyai 10 orang perkerja untuk membantu”. (Wawancara bersama H. N, 01 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa adanya keterlibatan dari masyarakat dalam proses kolaborasi memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian hasil akhir dicapai dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam aktivitas pemilahan dan pengurangan sampah. Begitu pentingnya peran masyarakat dalam usaha bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dalam upaya menciptakan *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai hasil sementara telah dicapai untuk kolaborasi yang telah di laksanakan. Berikut kutipan wawancaranya:

“ Dalam proses kolaborasi, ada hasil pencapaian yang harus dicapai dari kolaborasi yaitu indikator penyusunan kebijakan telah tercapai dengan adanya rancangan perda nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan telah terbit Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik, indikator penanganan sampah 75,15% di tahun 2022, indikator pengurangan sampah 6,12% di tahun 2022, indikator-indikator lain terkait koordinasi dan konsultasi dengan pihak yayasan peduli negeri dan masyarakat tercapai 100% sesuai dengan laporan capaian kinerja tahunan, dan budidaya manggot dengan YPN di paccerakang masih berjalan dan pengelolaan TP3R serta sosialisasi-sosialisasi di tahun 2023”. (Wawancara bersama KF, 17 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa terjalannya kolaborasi untuk mencapai hasil akhir dicapai dalam konteks tata kelola sampah berkelanjutan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki target pencapaian dalam berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan, termasuk penyusunan kebijakan pengelolaan sampah melalui regulasi daerah yang sesuai. Penanganan dan pengurangan sampah juga mencapai

target yang memuaskan, seiring dengan pencapaian dalam koordinasi antara pihak swasta dan masyarakat. Upaya diversifikasi pengelolaan sampah melalui kemitraan dengan Yayasan Peduli Negeri dalam budidaya maggot juga menunjukkan langkah inovatif.

Secara keseluruhan, kolaborasi ini telah memberikan hasil positif yang bervariasi, menandakan komitmen semua pihak. Tidak hanya itu, pihak swasta juga mempunyai hasil akhir dicapai untuk kolaborasi yang terjalin dengan pemerintah guna untuk mencapai tujuan bersama dalam kolaborasi. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh kepala Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Negeri:

“Pencapaian kami setiap kolaborasi yaitu kami melihat laporan program tiap tahun, melihat indikator keberhasilan program antara lain; seberapa besar partisipasi masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah, seberapa besar bank sampah yang aktif, seberapa banyak reduksi sampah dan omset di bank sampah induk makassar”. (Wawancara bersama SR, 22 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan dalam setiap kerjasama dievaluasi melalui laporan program. Ini mencakup partisipasi masyarakat sebagai nasabah bank sampah, aktifnya jumlah bank sampah, pencapaian reduksi sampah, dan omset di bank sampah induk Makassar. Evaluasi atas pencapaian untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi antara semua pihak terlibat. Untuk meningkatkan dan menjaga agar terjadinya kolaborasi yang untuk mencapai hasil akhir dicapai kepala yayasan peduli negeri mengatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan hasil yang kita capai Yayasan Peduli Negeri selalu memberikan rekomendasi hasil kegiatan setiap tahun

kepada pemerintah. Untuk dijadikan acuan di tahun ke depannya”. (Wawancara bersama SR, 22 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Yayasan peduli Negeri bekerjasama ini tidak hanya berfokus pada pencapaian, tetapi juga menempatkan pada upaya peningkatan terus-menerus demi mencapai tujuan yang lebih baik dalam tata kelola sampah di Kota Makassar.

Dalam kolaborasi antara Yayasan Peduli Negeri dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah memberikan keterlibatan aktif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan efektivitas tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar. Selain itu, partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil sementara menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar.

C. Pembahasan Penelitian

Dalam bagian ini, terdapat penjelasan topik yang sesuai dengan temuan penelitian, sehingga pada pembahasan ini, peneliti akan mengabungkan hasil penellitian dengan teori yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Hal ini sejalan dengan metode analisis kualititaif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Identifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan. Adapun pembahasan terkait *Collaborative Governance* dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan.

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat berdampak positif. Dengan menciptakan ruang kolaborasi yang kuat di antara semua pihak terlibat. Dialog tatap muka memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk saling berbagi ide, pandangan, dan mengembangkan langkah-langkah praktis dalam penanganan permasalahan sampah.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait dialog tatap muka yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat ditemukan bahwa dalam proses terjalannya dialog tatap muka dilakukan setiap bulan dengan diadakannya 2-3 kali pertemuan memberikan peluang dengan berkomunikasi secara terbuka dan berlangsung sangat efektif untuk menjalankan koordinasi antara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri untuk mencapai tata kelola sampah berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendorong dalam proses pengambilan keputusan dalam permasalahan sampah yang ada di Kota Makassar.

2. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai kolaborasi antara Dinas lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri dan masyarakat dalam tata kelola

sampah berkelanjutan. Kerjasama yang sukses dalam mendukung tata kelola sampah berkelanjutan sering kali bergantung pada kepercayaan yang dibangun di antara semua pihak terlibat, termasuk dinas lingkungan hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat. Dalam teori Ansell & Gash (2007) tentang kolaborasi, kepercayaan timbal balik di antara stakeholder dianggap sebagai elemen kunci. Ini menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan dalam membentuk kerjasama yang produktif dan saling menguntungkan.

kerjasama yang berhasil dalam tata kelola sampah yang berkelanjutan. Langkah-langkah seperti memberikan informasi secara terbuka, melakukan evaluasi dan pelaporan yang jujur yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup serta mengikutsertakan secara aktif semua pihak terkait termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat, sangat penting. Dengan melalui program manajemen sampah yang melibatkan masyarakat RT/RW, kelurahan maupun kecamatan dalam partisipasi kegiatan untuk kepercayaan ini bisa diperkuat, sehingga terjalinnya hubungan yang positif dan produktif antara dinas lingkungan hidup Kota Makassar, yayasan peduli negeri dan masyarakat yang terlibat dalam upaya menjaga lingkungan dan mencapai tujuan.

3. Komitmen Terhadap Proses

Kerjasama dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar menekankan pentingnya komitmen untuk mencapai kesuksesan dalam kolaborasi. Mencapai kolaborasi yang baik dan efisien, komitmen bersama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan Masyarakat terhadap proses tidak hanya menjadi dasar penting untuk membangun hubungan kerjasama yang kokoh, tetapi juga mendukung kelangsungan kerja kolaborasi yang efektif.

Dari hasil observasi penulis dilapangan terkait komitmen terhadap proses menunjukkan bahwa kolaborasi yang berhasil dapat dilihat melalui keberhasilan program pengelolaan sampah, terutama melalui kelangsungan lembaga bank sampah dan unit bank sampah. Meskipun terdapat hambatan maupun tantangan dalam menjalankan komitmen bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Yayasan Peduli Negeri, seperti pergantian personel yang terbatas, namun koordinasi secara teratur harus dilakukan untuk memelihara hubungan yang baik untuk mencapai tujuan. Yayasan peduli negeri berhasil mengimplementasikan strategi pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat, dengan keterlibatan masyarakat dalam mengikuti sosialisasi terkait permasalahan sampah.

4. Pemahaman Bersama

Pentingnya kesepahaman bersama dalam konteks ini adalah untuk memfasilitasi terciptanya kerjasama yang efektif antara Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat terkait. Hal ini bertujuan agar upaya dalam mencapai tata kelola sampah dapat dilaksanakan dengan efisiensi dan berhasil=

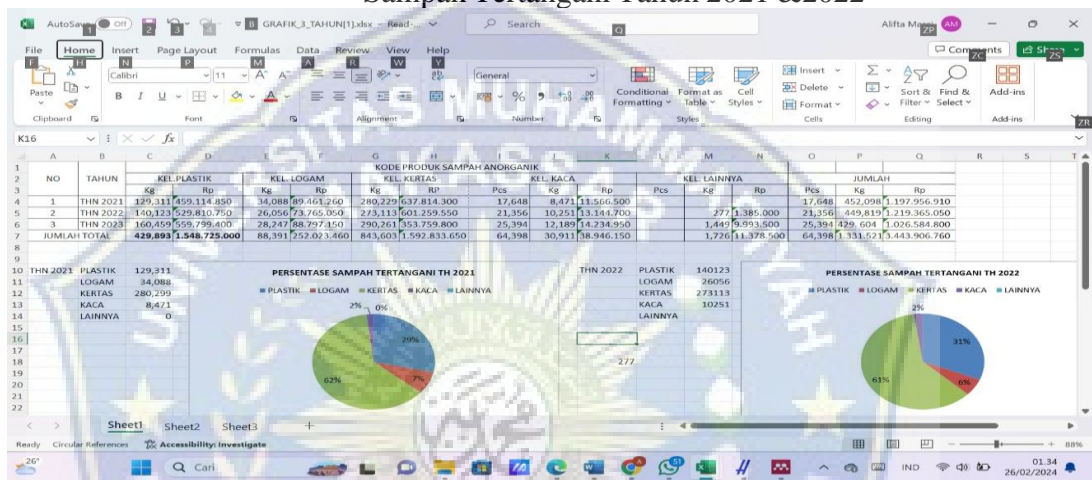
Mencapai keberhasilan dari pemahaman bersama adanya indikator yang ditetapkan bertujuan untuk mencapai tujuan akhir dari program yang dijalankan bersama sebagai ukuran keberhasilan pemahaman bersama. Memperkuat pemahaman bersama antara dinas lingkungan hidup dengan Yayasan Peduli Negeri sebagai mitra, dinas lingkungan hidup Kota Makassar melakukan perekrutan motivator pengelola bank sampah di 15 kecamatan, melibatkan setiap masyarakat.

5. Hasil akhir yang dicapai

Dari hasil penelitian, hasil sementara dalam tata kelola sampah berkelanjutan Tercapainya hasil sementara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat diukur dengan berbagai adanya indikator keberhasilan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki indikator keberhasilan seperti pencapaian dengan penanganan sampah mencapai 75,15% pada tahun 2022 dan pengurangan sampah sebesar 6,12% pada tahun yang sama. Disisi lain, memiliki target pencapaian dengan seperti penanganan sampah mencapai 70% pada tahun 2025 dan pengurangan sampah sebesar 30%. Kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar,

Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat telah mencapai pencapaian 100%, termasuk dalam pengelolaan TP3R dan sosialisasi-sosialisasi bank sampah dan pengelolaan sampah yang dilakukan pada tahun 2023 serta kegiatan budidaya maggot di Paccerrakkang yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Gambar 4.4
Sampah Tertangani Tahun 2021 & 2022



Sumber: Yayasan Peduli Negeri 2023

Gambar 4.5
Sampah Tertangani Tahun 2023



Sumber : Yayasan Peduli Negeri 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai *collaborative governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Makassar, terdapat beberapa temuan yang dapat disimpulkan

1. Dialog tatap muka yang terbuka dan efektif antara Dinas Lingkungan

Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat, tercipta kesempatan untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya mencapai tata kelola sampah yang berkelanjutan di Kota Makassar. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait permasalahan sampah menjadi kunci dalam mempromosikan kesadaran lingkungan dan menciptakan solusi yang berkelanjutan.

2. Keberhasilan kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri kerjasama yang efektif antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat bergantung pada pembangunan kepercayaan di antara semua pihak tersebut . Keberhasilan kerjasama ini didasarkan pada kepercayaan yang tercipta, yang tercermin dalam pelaporan dan evaluasi oleh pihak dinas lingkungan hidup Kota Makassar serta partisipasi masyarakat dalam program pelatihan manajemen sampah.
3. Komitmen terhadap proses yang berhasil antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Yayasan Peduli Negeri tercermin dari

keberhasilan dalam program pengelolaan sampah, terutama pada kelangsungan lembaga bank sampah dan unit bank sampah. Yayasan Peduli Negeri juga berhasil dalam mengimplementasikan strategi pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat dengan mengikutsertakan dalam sosialisasi mengenai masalah sampah.

4. Pemahaman bersama antara dinas lingkungan hidup, yayasan peduli negeri dan masyarakat adalah untuk memudahkan kerjasama yang efektif dalam mencapai tata kelola sampah yang sukses. Kesepahaman dengan pelaksanaan program dengan efisiensi dan keberhasilan. Dalam konteks ini, penguatan pemahaman bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Yayasan Peduli Negeri dilakukan melalui rekrutmen motivator pengelola bank sampah di setiap kecamatan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
5. Kolaborasi antara dinas lingkungan hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat memiliki indikator keberhasilan yang mencakup pencapaian penanganan sampah sebesar 75,15% dan pengurangan sampah sebesar 6,12% pada tahun 2022, dengan target meningkatkan pencapaian menjadi 70% dan pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025. Kolaborasi yang telah terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup, Yayasan Peduli Negeri, dan masyarakat telah mencapai pencapaian sebesar 100%, termasuk melalui kegiatan pengelolaan TP3R dan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2023 dan budidaya maggot di Paccerakkang yang melibatkan partisipasi masyarakat.

B. Saran

Untuk meningkatkan *Collaborative Governance* dalam tata kelola sampah berkelanjutan, beberapa saran yang penulis dapat kemukakan:

1. Tetapkan jadwal pertemuan berkala bagi dinas lingkungan hidup Lingkungan Hidup Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri dan masyarakat untuk berdiskusi, berkoordinasi, bertukar informasi, ide, dan mengevaluasi kegiatan.
2. Perlunya memperkuat kepercayaan di antara pihak dinas lingkungan hidup, yayasan peduli negeri dan masyarakat yang terlibat dalam kolaborasi.
3. Meningkatkan kolaborasi pihak dinas lingkungan hidup Kota Makassar dan yayasan peduli negeri menjalin kerjasama untuk tetap komitmen terhadap proses yang berhasil, terutama dalam menjaga kelangsungan lembaga bank sampah dan unit bank sampah, perlu diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2019). Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di indonesia. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106–118.
- Afrisal, A. F. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BONE (STUDI KASUS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA)= COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS IN BONE RE*. Universitas Hasanuddin.
- Andhika, L. R. (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open government. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Aulia, D. C., Situmorang, H. K., Prasetya, A. F. H., Fadilla, A., Nisa, A. S., Khoirunnisa, A., Farhan, D., Nindya, D. N., Purwantari, H., & Jasmi, I. O. D. (2021). Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan pesan jepapah. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*, 1(1).

Buana, P. (2022). *KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DAN PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA DALAM PENCEGAHAN HIV–AIDS (STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)*.

Cahya, N. (2020). Proses Collaborative Governance Dalam Penerapan Uang Elektronik (UNIK) Di Jalan Tol Kota Makassar. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.

Da Costa, C. (2018). *Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang)*. Fakultas Hukum UNISSULA.

Daryono, B. S., Sarosa, W., Ubaidillah, R., Widyatmoko, D., Purnomo, D. W., Djohan, T. S., Hadisusanto, S., Aipassa, M. I., & Setyawati, T. (2023). *Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara Perspektif Biologi*. UGM PRESS.

Dwiyanto, B. M. (2011). *Model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan*.

Gunawan, A., & MARUF, M. F. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Publika*, 8(2).

Habibah, E. N., Sos, S., & Rumah, P. P. (2020). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.

- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Hartono, Y., Mardhia, D., Ayu, I. W., & Masniadi, R. (2020). *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*. Literasi Nusantara.
- Hayu Susilo Prabowo, H. (n.d.). *Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam*.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif, kuantitatif dan mixed method)*. Hidayatul Quran.
- Huduri, A. N. A. (2018). Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Mimbar Keadilan*, 14(28).
- HUMAERAH, I. F. (2022). *ANALISIS KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN PERUSAHAAN ENTOMO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- ikram Ikram, M. (2020). Pendekatan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 94–110.
- Irawan, D. (2017). Collaborative governance (studi deskriptif proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di kota surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12.
- Ismail, H. A. U. (n.d.). *Modal Sosial Untuk Penguatan Kesadaran Masyarakat*

Dalam Mengelola Sampah Di Wilayah Bank Sampah Mapela TM 05 Desa Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif

Kamil, I. (2018). Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Lingkungan Kumuh. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 129–139.

Kariem, M. Q., & Afrijal, A. (2021). Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(3).

Kumorotomo, W. (2013). Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik. *Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM.*

KURNIAWAN, A. I. (n.d.). *PERUBAHAN POLA PIKIR MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM BANK SAMPAH (STUDI KASUS KELURAHAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR).*

Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). *Open government: Collaboration, transparency, and participation in practice.* “O’Reilly Media, Inc.”

LEGI, A. F. (2022). *Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.* Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Mahyudin, R. P. (2017). Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 3(1).

Mayarni, M., Meiwanda, G., & Zulkarnaini, Z. (2020). *Pembangunan*

Berkelanjutan Teoritis dan Empiris.

MEIRSAGUNA, D. A. (2016). *FOTOGRAFI DOKUMENTER PROGRAM DIET KANTONG PLASTIK SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH SAMPAH PLASTIK DIKOTA BANDUNG. DION AKHRIO MEIRSAGUNA*
10.60. 200.02. Fotografi & Film.

Mukti, R. A., & Efendi, D. (2020). *Kampung Hijau Gambiran: Praktik Tata Kelola Lingkungan Hidup berbasis Collaborative Governance*. Samudra Biru.

NAPO, S. A. P. N. (2023). *PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA DANAU TANGKAS KABUPATEN MUARO JAMBI*. UNIVERSITAS JAMBI.

Noor, M. (2022). Collaborative Governance on the Smart City-based Regional Development of Balikpapan. *Journal of Social Studies Education Research*.

Nopiana, T. (2019). *STUDI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS REDUCE-REUSE-RECYCLE (3R) DI KOTA BANDUNG*. Universitas Pasundan.

Peranginangin, L. S. U. (2014). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(1), 66–78.

Pradana, A. E., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2020). Public-Private Partnership in the Framework of Waste Management into Electrical Energy in Jatibarang Landfill, Semarang City. ... *of Local Government Issues*.

Purnomo, C. W. (2021). *Solusi pengelolaan sampah Kota*. UGM PRESS.

Rahim, A. (2022). *COLABORATIVE GOVERNANCE MODEL KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUNGAI/PARIT SEBAGAI BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

Ranawijaya, I. B. E., & UNUD, F. H. (2018). Kajian terhadap kebijakan kepariwisataan budaya dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030 [Laporan Penelitian]. *Denpasar.(ID): Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).

Sampah, A. P. (2021). BAB 5 MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH. *KESEHATAN LINGKUNGAN SUATU PENGANTAR*, 54.

Sari, D. N., Susilawati, S., & Zulaiha, S. (2020). *Pengembangan Kreativitas Siswa Menghasilkan Karya melalui Daur Ulang Sampah pada Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan SDN 49 Rejang Lebong*. Institut Agama Islam Negeri Curup.

Sembel, D. T. (2015). *Toksikologi lingkungan*. Penerbit Andi.

Septiani, I. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENCIPTAKAN EKONOMI KREATIF DI DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Silalahi, M. I., Yunus, M. L., Syamsul, M., Hardianti, S., Paramitha, D. S., Firmansyah, H., Gunawan, E., & Gumilar, A. (2021). *KESEHATAN LINGKUNGAN SUATU PENGANTAR*. Penerbit Insania.

SITUMEANG, D. E., HAWA, M. M., & ISMAIL, K. (2021). PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030 Goals 4 ENSURE INCLUSIVE AND EQUITABLE QUALITY EDUCATION AND PROMOTE LIFELONG LEARNING OPPORTUNITIES FOR ALL. *Pembangunan Berkelanjutan SDGs 2030 Goals 4, June*.

Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1–23.

Sutrisno, S. F. (2018). *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Dalam Tinjauan Hukum Islam*.

Suwerda, B. (2019). *Faktor-faktor Determinan bank sampah dan alternatif pengembangannya di Kabupaten Bantul*. Universitas Gadjah Mada.

Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.

Widyaningsih, T., & Ma'ruf, A. (2017). Eksternalitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 86–102.

Zaenafi Ariani, S. E., Nurjannah, S., SH, M. H., & Syawaluddin, S. E. (2022).

*Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Dukungan Terhadap
Pariwisata Berkelanjutan (Konsep, Paradigma dan Implementasi).*

Deepublish.



L

A

M

P

I

R

A

N



Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Hari Peduli Sampah Nasional 2022



1. Dokumentasi Unsur Pemerintahan



Wawancara bersama subbagian Persampahan, limbah B3, kapasitas dan peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

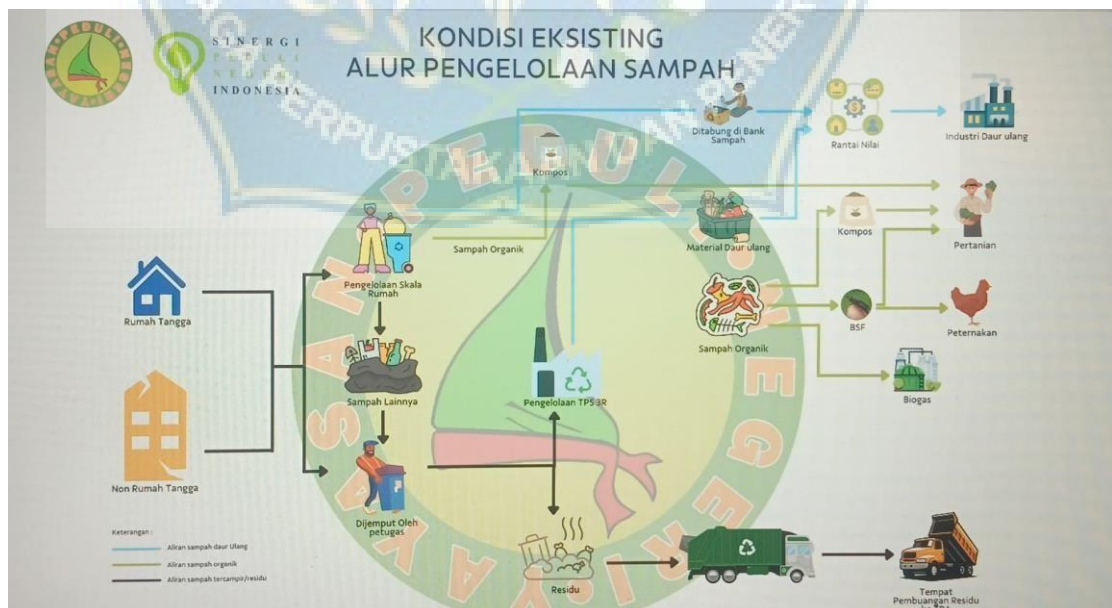
(Ibu Kahfiani, S. Hut)

1. Dokumentasi Unsur Swasta



Wawancara bersama kepala direktur eksekutif yayasan peduli negeri
(Bapak sahar)

Gambar Alur Pengelolaan Sampah



Sumber: Yayasan Peduli Negeri

Dokumentasi Pihak Swasta Bersama Masyarakat



Pelatihan kepada masyarakat

2. Dokumentasi Unsur Masyarakat



Wawancara bersama masyarakat (Bapak H. Nambu)



**Wawancara bersama masyarakat Tukang Angkut Sampah
(Bapak Shamsu Bahri)**



3. Keterangan Bebas Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 864972, 861288, Fax (0411) 863288

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama Alita S. Massi
Nim 105641100620
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya

Makassar, 21 Februari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan



Hum, M.L.P.
NIM 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,861 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

AB I Alifia S. Massi - 105641100620

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk
Internet Source

5%

2

www.kabarmakassar.com
Internet Source

5%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography On

Sub
Sub
File
Wor
Char

AB III Alifta S. Massi - 105641100620

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	3%
2	repository.umuhjember.ac.id Internet Sources	3%
3	repository.unhas.ac.id References	2%

Exclude quotes

100%

Exclude graphics

Exclude bibliography

0%

S
S
F
V
C

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI

IV Alifita S. Massi - 105641100620

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unhas.ac.id
Internet Source

3%

2

id.wikipedia.org
Internet Source

3%

3

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches



Dipindai dengan CamScanner

V Alifta S. Massi - 105641100620

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX



3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.slideshare.net
Internet Source

3%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



RIWAYAT HIDUP



Aliftha Savanamiroh Massi, dilahirkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada 24 Februari 2002, Merupakan anak pertama dari pasangan Alm. Bapak Hardi Wijaya Massi dan Ibu Muliyanti Mamonto. Penulis Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Moyongkota Baru dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 6 Kotamobagu dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAT WIRA BHAKTI GORONTALO dan lulus pada tahun 2020.

Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha serta dukungan dari orang terkasih, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Pada Tahun 2024 tepatnya pada 28 Februari, penulis dikukuhkan dengan gelar sarjana ilmu politik (S.IP) dengan judul penelitian “Collaborative Governance dalam Tata Kelola Sampah Berkelanjutan di Kota Makassar”. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat menjadi kontribusi bagi peneliti lain, dan bagi penulis sendiri, Terimakasih.